

Bandar Lampung, 31 Januari 2024

No. : 052 /LLB-BDL/DIR.UM/2024

Kepada Yth,
DPP Perbarindo dan Media BPR
RUMAH PERBARINDO,
Komp. PATRA II No.46
Jl. Jend. Ahmad Yani-Bypass
Cempaka Putih- Jakpus

Perihal: Penyampaian Laporan Pelaksanaan GCG (Tata Kelola)
PT. BPR Langgenglestari Bersama Tahun 2023

Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor: 4/POJK.03/2015 dan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor: 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan atas surat edaran otoritas jasa keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi Bank perkreditan rakyat.

Bersama ini kami Sampaikan Laporan Pelaksanaan GCG (Tata Kelola) PT. BPR Langgenglestari Bersama Tahun 2023

Demikian agar maklum dan Kami Mengucapkan Terimakasih.

PT. BPR LANGGENGLESTARI BERSAMA

Direksi,



[YULIANUS SUDARMANTO]

Direktur Kepatuhan

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Langgenglestari Bersama

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665269-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600084-29012024134650

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

achmadds85@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-29 13:46:50



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR LANGGENGLESTARI BERSAMA
TAHUN 2023**



**JL. LAKS MALAHAYATI NO. 7-7A
TELEPON: 0721 487878**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Dalam upaya menciptakan kegiatan perbankan yg sehat & berkualitas BPR Langgeng selalu berupaya utk menerapkan GCG pd thn 2023, Kecukupan SDM pada struktur organisasi agar tidak terjadi rangkap jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan, peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan dari internal atau eksternal dan pembinaan dari direksi atau pimpinan unit kerja masing masing. Kinerja BPR dpt terlihat pd lap keu kualitatif & kuantitatif. Kinerja kualitatif telah dilakukan perbaikan al. pembuatan SK direksi yg mengatur lbh rinci terkait juklak turunan kebijakan BPR, serta melakukan rotasi karyawan utk antasipasi agar tdk terjadi fraud. Kinerja kuantitatif pd neraca & L/R ada perbaikan bila dibandingkan dg kinerja laporan keuangan 2022. Bbrp rasio keuangan secara keseluruhan sesuai dgn ketentuan dan target tercapai. sedangkan yg memerlukan perbaikan pd thn berikutnya adalah rasio NPL, KAP, MIAPB (modal inti terhadap aktiva produktif bermasalah). BPR memiliki komitmen yg kuat utk melaksanakan GCG yg telah diatur oleh OJK, agar BPR dpt terus tumbuh scr berkelanjutan & memiliki daya saing di industri perbankan. Penerapan GCG yang Baik pada BPR didukung oleh integritas yg tinggi melalui proses intern yg melibatkan seluruh organ BPR dari Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan agar penerapan GCG menjadi budaya perusahaan dalam setiap kegiatan usaha. BPR Langgeng telah beroperasi lebih dari 25 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen BPR utk mencapai Visi, yaitu mjd penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yg kompeten utk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah. Dalam penerapan Tata Kelola, BPR selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	JUNAIDI
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank</p> <p>c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.</p> <p>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.</p> <p>e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.</p> <p>G. Melakukan Evaluasi terkait Kebijakan yang mempengaruhi kegiatan bisnis agar Kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi terkini BPR</p>		
2.	Nama	:	YULIANUS SUDARMANTO
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>b. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko</p> <p>c. Menetapkan langkah- langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang</p> <p>d. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang serta Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain;</p> <p>e. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan</p> <p>f. Melakukan Evaluasi terkait Kebijakan yang mempengaruhi kegiatan bisnis agar Kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi terkini BPR</p>		
	Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :		
	<p>a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis BPR Langgeng.</p> <p>b. Tingkat Kesehatan Bank dipertahankan dalam posisi sehat.</p> <p>c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan</p>		

Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal bersifat bulanan) terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR.

d. Monitor secara ketat debitur yang mengalami penurunan kualitas Kredit.

e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2023.

f. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.

g. Memastikan tindaklanjut Penerapan Manajemen risiko terkait penetapan limit telah sesuai dengan kondisi bisnis BPR

Penjelasan Lebih Lanjut :

Pengurus BPR LanggengLestari Bersama yaitu Dewan Komisaris dan Direksi selalu mengkomunikasi secara rutin dalam kegiatan operasional agar sejalan dengan tata kelola yang sehat sesuai dengan ketentuan regulasi OJK. Selanjutnya pengurus secara dua arah membahas perkembangan kegiatan operasional BPR baik secara lisan maupun dalam bentuk rapat, seperti strategi dan rencana tindak BPR dalam memperbaiki tingkat kesehatan, menetapkan skala prioritas yang harus ditindaklanjuti, kendala yang dihadapi BPR. Pada semester 2 tahun 2023 pengurus dan manajemen lebih banyak membahas penyelesaian kredit bermasalah pasca merger dengan BPR Trisurya Bumindo dan pembahasan rencana merger dengan BPR Artharindo di tahun 2024.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	HARDY YUNNARAGA
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</p> <p>b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank</p> <p>c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan</p> <p>d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.</p> <p>e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.</p> <p>f. Memastikan Penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan kebijakan yang telah direalisasikan</p>			
2.	Nama	:	KASWADI
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</p> <p>b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank</p> <p>c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan</p> <p>d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan</p>			

Instansi lainnya. e. Memastikan Penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan kebijakan yang telah direalisasikan
Rekomendasi Kepada Direksi :
<p>a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.</p> <p>b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.</p> <p>c. Secara rutin melakukan pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode bulanan) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR.</p> <p>d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami penurunan kualitas kredit agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat.</p> <p>e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2023.</p> <p>f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.</p> <p>g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.</p>
Penjelasan Lebih Lanjut :
<p>1. Menjalankan keputusan RUPS tahunan dan RUPS LB</p> <p>2. Merealisasikan RBB 2023 dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPR Langgengestari Bersama.</p> <p>3. Melakukan konsolidasi paska merger dan memperbaiki tingkat kesehatan BPR</p> <p>4. Menyelesaikan Aktiva Produktif bermasalah menjadi produktif</p>

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	

BERDASARKAN JUMLAH MODAL INTI BPR LANGGENG BELUM DIWAJIBKAN MEMILIKI / MEMBENTUK KOMITE DALAM PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI, DENGAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DAN EFISIENSI BIAYA MAKA BPR LANGGENG BELUM MEMBENTUK KOMITE.

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	BPR LANGGENG DALAM STRUKTUR ORGANISASINYA TIDAK MEMPUNYAI ANGGOTA KOMITE INDEPENDEN.

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
KARENA TIDAK MEMPUNYAI KOMITE MAKA BPR LANGGENG TIDAK ADA PROGRAM KERJA UNTUK KOMITE			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)

1.	JUNAI DI	Rp0	0%
2.	YULIANUS SUDARMANTO	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
PADA PERIODE KERJA TAHUN 2023, DIREKSI TIDAK MEMILIKI SAHAM PADA BPR LANGGENGLESTARI BERSAMA			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	JUNAI DI	-	-	0%
2.	YULIANUS SUDARMANTO	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
PADA TAHUN 2023, DIREKSI TIDAK MEMILIKI SAHAM DI PERUSAHAAN LAIN				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	JUNAI DI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	YULIANUS SUDARMANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
DIREKSI TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM, ANTAR DIREKSI, ATAUPUN DENGAN DEWAN KOMISARIS				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	JUNAI DI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	YULIANUS SUDARMANTO	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
SAMPAI SAAT INI DIREKSI TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA TERHADAP SESAMA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	HARDY YUNNARAGA	Rp10.749.000.000	48.86%
2.	KASWADI	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Pada Periode tahun 2023, paska merger Tn. HARDY YUNNARAGA sebagai Komisaris Utama serta menjadi Pemegang Saham Pongedali pada BPR LanggengLestari Bersama			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	HARDY YUNNARAGA	601270	PT. BPR Artharindo	20%
2.	HARDY YUNNARAGA	601259	PT BPR Fidusia Civitas	35.71%
3.	HARDY YUNNARAGA	600042	PT. BPR Supradana Mas	58.56%
4.	HARDY YUNNARAGA	601955	PT. BPR Prabumegah Kencana	40%
5.	HARDY YUNNARAGA	602596	PT BPR Prima Dana Abadi	20%
6.	HARDY YUNNARAGA	602716	PT BPR Perdana Cipta Sejahtera	50%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kepemilikan saham Tn Hardy Yunaraga pada tahun 2023 yang merupakan salah satu Anggota Dewan Komisaris dan PSP pada BPR LanggengLestari Bersama, kepemilikan saham pada BPR Lain tidak mengalami perubahan.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	HARDY YUNNARAGA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

2.	KASWADI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PENGURUS DI PT. BPR LANGGENGLESTARI BERSAMA TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KEUANGAN TERHADAP SESAMA DEWAN KOMISARIS DAN ATAU KEPADA DIREKSI.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	HARDY YUNNARAGA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	KASWADI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DAN ATAU TERHADAP DIREKSI				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp63.989.382	2	Rp34.879.720
2.	Tunjangan	2	Rp5.000.000	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp68.989.382		Rp34.879.720
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Pada tahun 2023 pengurus (Dewan Komisaris hanya mendapat paket remunerasi & bonus, kemudian Direksi mendapat remunerasi dan tunjangan jabatan dan bonus)					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Operasional (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (1)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
1. Direksi mendapat fasilitas 2 mobil operasional untuk 2 direksi, kendaraan berupa Toyota Inova th 2012 & Toyota Inova 2015, dpt dibawa pulang oleh anggota direksi. 2. Direksi mendapat fasilitas BPJS kesehatan dan BPJS TK 3. 1 (satu) anggota komisaris mendapat fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS TK			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	6.43 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.38 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.33 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.01 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.42 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Data diambil berdasarkan gaji bulan Desember 2023	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	28 Juli 2023	2	1. Membahas hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap pencapaian RBB BPR semester I 2023 paska merger 2. Target2 keuangan RBB, pos pendapatan bunga

			<p>hanya tercapai 94,62% (kurang Rp.697.992.813), dari provisi kredit tercapai 94,22% (masih kurang Rp.46.758.496). Pos beban ; bunga kontraktual deposito melampaui 107,43% dari RBB, bunga kontraktual tabungan melampaui 108,21% dari RBB.</p> <p>3. Keputusan rapat : meminta direksi dan jajarannya segera mengambil langkah2 ; pemberian kredit harus dilakukan secara benar dan tepat, menjaga kualitas kredit, melakukan penyelesaian kredit bermasalah, melakukan penjualan barang/ aguanan yang sudah di AYDA.</p>
2.	31 Agustus 2023	7	<p>1. Membahas tindak lanjut surat OJKno.S-213/KO.0741/2023 tentang hasil pemeriksaan umum tahun 2023, erkait permintaan penyampaian action plan penyelesaian kredit bermasalah, AYDA, dan kredit hapus buku.</p> <p>2. Tim Quality Asset diminta mengambil langkah2 penyelesaian kredit bermasalah, AYDA dan kredit hapus buku.</p> <p>3. debitur kol 3 disurati surat penagihan agar segera melunasi tunggakan, debitur kol 4,5 dikirim surat penagihan/ lakukan kunjungan dan minta komitmen/ janji penyelesaian, serta jalur litigasi, lelang KPKNL.</p> <p>4. Penyelesaian AYDA ; cek berkas dokumen legalitasnya, AYDA yg diatasnamakan karyawan/ pengurus BPR Trisurya segera diganti atau di BN ke PT. BPR Langgeng, menggunakan lawyer jika terdapat perlawanan dari debitur,</p> <p>5. Penyelesaian kredit hapus buku.</p>
3.	29 Mei 2023	3	<p>1. Langkah-langkah dana idle BPR pasca merger</p> <p>2. Dana BPR pasca merger meningkat cukup signifikan sehingga berpotensi mengurangi pendapatan</p> <p>3. Dilakukan evaluasi penempatan dana dengan prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko sesuai ketentuan sop</p> <p>4. Diprioritaskan penempatan pada BPR atau BPRS pada wilayah propinsi Lampung</p>
4.	09 Juni 2023	5	<p>1. Meningkatkan kredit bermasalah pasca merger</p> <p>2. Evaluasi RBB pasca merger</p> <p>3. Relokasi kantor dari jl kartini ke amir hamzah</p> <p>4. Membahas hasil temuan diskoner terkait dengan norma ketenagakerjaan</p>
5.	15 Juni 2023	5	<p>1. Koordinasi monitoring kredit lancar dan dalam pengawasan khusus</p> <p>2. Tindak lanjut penyelesaian kredit bermasalah</p>
6.	10 Agustus 2023	5	<p>1. Kebijakan direksi yaitu surat keputusan direksi no 006/LLB-BDL/DIR.SK/IV/2022 tentang biaya pengadaan barang dan jasa</p>
7.	31 Agustus 2023	6	<p>1. Tindak lanjut surat OJK no S213/KO.0741/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang hasil pemeriksaan umum tahun 2023</p>

			2. Penyampaian action plan mengenai penyelesaian kredit beramal / ayda / kredit hapus buku
8.	27 November 2023	6	1. Kinerja keuangan BPR pasca merger 2. Proyeksi sampai dengan akhir tahun 31 Desember 2023 3. Perisapan rencana RUPS tanggal 28 November 2023 terkait penunjukan KAP, status perubahan kantor, rencana merger dengan BPR Artharindo, permohonan hapus buku dan ayda, rencana pergantian CBS
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif telah melakukan rapat-rapat pada tahun 2023 untuk penyelesaian prioritas pekerjaan sesuai dengan RBB 2023, serta melakukan evaluasi dan penyampaian kondisi kinerja perusahaan apa yang sudah tercapai maupun yang masih belum tercapai.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	HARDY YUNNARAGA	4	0	50%
2.	KASWADI	8	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris Hadir pada saat rapat dilaksanakan				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
1. Komisaris & Direksi memberikan contoh kepada seluruh karyawan tidak melakukan fraud dalam perusahaan. 2. Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan fraud pada periode sbm tahun laporan maupun pada periode tahun laporan 2023. 3. Pegawai tetap dan Tidak Tetap tidak melakukan fraud pada periode sbm tahun laporan maupun pada periode tahun laporan 2023.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	3	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	4	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
<p>1. Berperkara di PN Menggala dg debitur an. Sutrisno dg permasalahan debitur tdk bersedia jaminan dilakukan sita eksekusi pengosongan jaminan, saat ini sudah dilakukan lelang I oleh PN Menggala dengan hasil tidak ada peminat, selanjutnya dilakukan lelang II dengan ketentuan nilai limit lelang diturunkan.</p> <p>2. Debitur a/ n Zainudin Permasalahan terkait Lelang pihak BPR melalui KPKNL Bandar Lampung telah melakukan proses lelang secara resmi namun anak debitur keberatan atas lelang tersebut dikarenakan nama SHM jaminan atas nama anak debitur yang bernama Rahmatulloh, alasan keberatan bahwa pemilik jaminan tidak diberitahukan bahwa adanya proses lelang, padahal pihak BPR telah memberitahukan kepada Debitur terkait data jaminan yang akan dilakukan Lelang. (tgl gugatan 11 April 2023) dan perkara tersebut telah SELESAI diputuskan oleh pengadilan negeri tanjung karang tgl. 23 Nov 2023 dengan menyatakan gugatan anak debitur tidak dapat diterima.</p> <p>3. Debitur a/n Muhammad Ali Hamid Permasalahan Tidak setuju dengan nilai Limit lelang atas jaminan debitur berupa SHM, dan menurut debitur nilai jaminan tersebut masih dapat dinaikan limitnya dan meminta pembatalan risalah lelang (tgl. gugatan 27 Februari 2023) atas permasalahan tsb perkara ini telah SELESAI diputuskan oleh PN Tanjung Karang tgl. 05 Desember 2023) dengan hasil Gugatan yang dilakukan oleh debitur PREMATUR (lelang tidak ada peminat) namun dilakukan gugatan.</p> <p>4. Debitur atas nama M Setiawan Putra, merupakan jaminan AYDA.</p>		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Selama periode tahun 2023 seluruh manajemen BPR Langgeng yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, serta masih sesuai dengan tata kelola BPR yang sehat.							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pada tahun 2023 manajemen tidak melakukan kegiatan politik yang dilakukan oleh BPR, sedangkan untuk kegiatan sosial terdapat kegiatan santunan sosial seperti sumbangan untuk kegiatan keagamaan, sumbangan kepada panti asuhan, dan sumbangan kegiatan sosial di lingkungan sekitar kantor, namun seluruh sumbangan tersebut sifatnya insidental dan tidak mengikat.

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR LANGGENGLESTARI BERSAMA
Alamat	: JL. LAKS MALAHAYATI NO. 7-7A
Nomor Telepon	: 0721 487878
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp33.265.478.216
Total Aset	: Rp304.219.073.341

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR LANGGENGLESTARI BERSAMA Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.2 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.04	0.408
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2	0.3
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.1	0.21
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.61	0.261
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.53	0.253
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.1	0.053
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.11	0.211
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.25	0.169
10	Rencana Bisnis BPR	2	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.55	0.191
Nilai Komposit			2.2
Peringkat Komposit			2
Predikat Komposit			Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.04)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi sbb;

- a. Bertanggung jawab melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dg Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
- b. berupaya merealisasikan pencapaian target kuantitatif dan kualitatif sebagaimana yang ditetapkan dalam RBB.
- c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan
- d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/ atau Otoritas Lainnya.
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- f. Melakukan Evaluasi terkait Kebijakan yang mempengaruhi kegiatan bisnis agar Kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi terkini BPR

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris sbb;

- a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank
- c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan
- d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.
- e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.
- f. Memastikan Penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan kebijakan yang telah direalisasikan

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

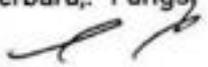
Dalam Periode Laporan tahun 2023 BPR Langgenglestari Bersama belum memiliki Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.1)

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan manajemen BPR Langgenglestari Bersama, berpedoman pada regulasi yang ada seperti dari POJK, SOP internal, SK Direksi dll. sehingga pada periode tahun 2023 tidak terjadi benturan kepentingan yang dapat berpotensi mengakibatkan kerugian bagi BPR, kerugian yang dimaksud dapat berupa financial ataupun reputasi, etika dan lain lain.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.61)

Pada tahun 2023 Penerapan Fungsi kepatuhan telah menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan rencana kerja yang dibuat namun masih belum optimal dikarenakan masih ada rencana yang belum terealisasi akan tetapi secara keseluruhan Fungsi Kepatuhan telah melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai BPR terkait peraturan baik kebijakan, SOP dan SK direksi terbaru. Fungsi



kepatuhan telah merekomendasikan terkait pembaruan Surat Keputusan Direksi yang menurut aturan perlu dilakukan seperti SK UKK APU dan PPT, UKK Literasi dan Inklusi Keuangan, UKK pengaduan dan pelayanan penyelesaian pengaduan konsumen, kebijakan tentang kepegawaian, dan lain lain.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.53)

Penerapan Fungsi Audit Intern secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan BPR telah menambah staff audit intern yang diharapkan dapat menambah ruang lingkup pemeriksaan dan memberikan masukan kepada Direktur Utama dalam hal terdapat kesalahan atau temuan yang terjadi pada kegiatan Operasional dan Bisnis namun prosesnya masih harus ditingkatkan dan Fungsi Audit intern harus lebih memahami lagi terkait peraturan yang telah direalisasikan agar terdapat kesesuaian antara hasil pemeriksaan dengan peraturan yang ada.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2.1)

Penerapan Fungsi Audit Ekstern dalam hal ini BPR telah menunjuk kembali AP: Drs Henry Susanto dan KAP : Drs Henry dan Sugeng untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk tahun 2023 penunjukan fungsi Audit Ekstern dilakukan pada RUPS dan terlebih dahulu di usulkan oleh Dewan Komisaris.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.11)

Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian Intern pada tahun 2023, PE manajemen risiko bersamaan dengan Fungsi Kepatuhan telah membuat dan menjalankan proses Sosialisasi dan rekomendasi terkait dengan aturan yang dipandang perlu dilakukan perbaikan serta telah melakukan sosialisasi kepada Risk Owner terkait laporan penunjang laporan Profil Risiko yaitu laporan Risiko Intern pada masing-masing bagian, kantor cabang dan KP. laporan risk owner telah mendapat persetujuan dari Penanggungjawab Pemilik risiko dan Direksi. Laporan risk owner juga menjadi parameter bagi pemilik risiko apakah terjadi pelampauan risk owner, atau masih dalam batas risk tolerance, sehingga menjadi acuan/ batasan dalam melakukan penilaian kegiatan bisnis dan Operasional, serta dapat minimalisir risiko..

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.25)

Manajemen BPR LanggengLestari Bersama mempunyai komitmen terhadap pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Nominal limit BMPK selalu dilaporkan ke OJK dan disosialisasikan kepada bagian terkait seperti bagian kredit, bagian adm kredit, audit internal, bagian legal. saat ini berdasarkan SOP maksimal pemberian kredit sebesar 80% dari limit BMPK, yaitu untukantisipasi jika terjadi penurunan BMPK. Manajemen terus berupaya patuh dan taat pada peraturan yang berlaku agar BMPK BPR tidak terjadi pelampauan atau menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

Manajemen BPR Langgeng dalam penyusunan RBB tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain : proyeksi kondisi makro ekonomi indonesia, pencapaian kinerja BPR langgeng pada periode tahun 2023, kemampuan SDM yang dimiliki, regulasi yang berlaku dalam mempengaruhi kegiatan usaha, serta mempertimbangkan keputusan RUPS / para pemegang saham. sedangkan realisasi RBB 2023 secara umum dapat tercapai, bahkan ada yang lebih dari 100%, sedangkan target yang tidak tercapai umumnya masih di atas 95% dari target.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.55)

Untuk mendukung tata kelola yang sesuai dengan ketentuan, manajemen BPR Langgeng menerapkan

transparansi kondisi keuangan dan non keuangan. Untuk laporan keuangan BPR Langgeng menggunakan vendor / CBS yang sudah on line dalam kegiatan operasionalnya, sehingga dapat memudahkan dalam proses pengawasan, pemeriksaan, serta kebenaran data yang disajikan, kecepatan memperoleh data, dan mempermudah pekerjaan. Dalam hal data yang diperoleh untuk pelaporan ke OJK, atau instansi lainnya juga diambil dari data CBS secara on line dan selama ini tidak pernah terjadi perbedaan data / selisih yang dapat berpotensi salah dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. Demikian juga dengan kondisi non keuangan manajemen BPR Langgeng menerapkan transparansi secara keseluruhan sebagai budaya perusahaan yang benar.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan penilaian Assesment di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan Tata Kelola BPR LanggengLestari Bersama pada tahun 2023 telah sejalan dengan aturan OJK atau regulasi lainnya. Dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha serta tingkat persaingan antar industri perbankan, manajemen akan melakukan perbaikan, penyesuaian kondisi dan perubahan yang ada, demikian juga memperhatikan kualitas SDM dan Komitmen yang telah dibuat harus ditingkatkan dan dijalankan sesuai dengan aturan yang ada agar menghindarkan BPR dari kesalahan/penyimpangan dari aturan yang dibuat oleh BPR sendiri dan regulasi. Dengan nilai komposit 2,2 manajemen BPR Laggeng akan terus mempertahankan penerapan tata kelola BPR agar menjadi BPR yang profit dan penerapan tata kelola menjadi budaya perusahaan bagi seluruh pengurus, pejabat eksekutif dan seluruh karyawan.

Bandar Lampung, 26 Januari 2024

PT. BPR LANGGENGLESTARI BERSAMA


HARDY YUNNARAGA
Komisaris Utama




JUNAIDI
Direktur Utama